

## Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022

Marisa Komala<sup>1</sup>, Asep Setiawan<sup>2</sup>, Ali Noer Zaman<sup>3</sup>, Amin Tohari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

<sup>4</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

E-mail:

[marisamala876@gmail.com](mailto:marisamala876@gmail.com), [asep.setiawan@umj.ac.id](mailto:asep.setiawan@umj.ac.id), [alinoerzaman@umj.ac.id](mailto:alinoerzaman@umj.ac.id),  
[amin.tohari@umj.ac.id](mailto:amin.tohari@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diplomasi Indonesia dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Mediasi konflik itu terjadi ketika Indonesia menduduki Presidensi G20 yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak G20 di Bali. Dalam penelitian ini konsep politik luar negeri dan diplomasi digunakan dalam mengkaji upaya Indonesia menjadi mediator konflik Rusia dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data sekunder baik jurnal, berita maupun sejumlah dokumen. Hasil penelitian; pertama, kepresidenan G20 Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar akibat dari kondisi politik dan ekonomi dunia, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan posisi politik dunia yang muram. Kedua, Indonesia melakukan diplomasi perdamaian dengan mengunjungi Ukraina pada tanggal 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendesak resolusi damai untuk konflik itu. Ketiga, Indonesia melakukan mediasi ke Rusia pada tanggal 30 Juni 2022. Keempat, Indonesia mengangkat isu perang Rusia dan Ukraina di forum G20 untuk mendorong terjadinya perdamaian.

**Kata kunci:** politik luar negeri, perang, diplomasi, perdamaian, mediasi

### ABSTRACT

*This research aims to examine Indonesia's diplomacy in handling the conflict between Russia and Ukraine in 2022. This conflict began with the attack by Russian troops on February 24 2022. Mediation of the conflict occurred when Indonesia occupied the G20 Presidency which hosted the G20 summit in Bali. In this research, the concepts of foreign policy and diplomacy are used to examine Indonesia's efforts to mediate the conflict between Russia and Ukraine. Meanwhile, this research uses qualitative methods with data collection techniques through secondary data, including journals, news and a number of documents. This research concludes that first, Indonesia's G20 presidency faces greater difficulties due to world political and economic conditions, such as the conflict between Russia and Ukraine which resulted in a gloomy world political position. Second, Indonesia carried out peace diplomacy by visiting Ukraine first on June 29 2022. President Joko Widodo urged a peaceful resolution to the conflict. Third, Indonesia also mediated with Russia on June 30 2022, as the 2022 G20 presidency. Fourth, Indonesia raised the issue of the Russian and Ukrainian war at the G20 forum to encourage peace.*

**Keywords:** foreign policy, war, diplomacy, peace, mediation

## 1. PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia serta Ukraina diawali oleh serangan pasukan Rusia pada 24 Februari 2022 (Shah, 2022). Tentara Rusia menyerbu kota-kota besar di Ukraina seperti Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy serta sebagian dari Ibu kota Kyiv. Pada 24 Februari 2022, Putin melalui pidato yang ditayangkan televisi mengumumkan serangan militer ke Ukraina. Putin sudah lama menentang hubungan Ukraina dengan Barat, dan terdapatnya laporan adanya rencana Ukraina masuk kedalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dengan dalih ini, Presiden Vladimir Putin melakukan serangan ke Ukraina dengan tujuan “demiliterisasi serta denazifikasi”

Berbagai kebijakan dalam mendamaikan Ukraina serta Rusia sudah terjadi dalam setahun lebih. Perundingan gencatan senjata di Belarus pada akhir Februari 2022 berakhir tanpa kesepakatan. Perundingan di Belarus diadakan di kota Gomel, daerah Belarus yang terdekat dengan Chernobyl Ukraina ini dimediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Presiden Volodymyr Zelensky enggan berunding lantaran beranggapan Belarusia ialah sekutu Rusia serta lebih memilih Polandia selaku zona netral untuk melaksanakan negosiasi (Fischer, 2022). Perundingan Rusia serta Ukraina tidak memberikan hasil optimal yakni gencatan senjata. Kedua belah pihak hanya menyetujui rencana mengevakuasi masyarakat sipil dari daerah yang jadi zona pertempuran di Ukraina. Pihak Rusia menyepakati terdapatnya koridor untuk organisasi kemanusiaan menyelamatkan masyarakat sipil (Hanan, 2022).

Pertikaian antara Rusia dan Ukraina mendapatkan reaksi dari bermacam negara. Banyak Negara didunia sudah memberikan sanksi kepada Rusia, Indonesia terhitung yang memberikan reaksi terhadap pertikaian tersebut dengan menekankan perlunya dihentikan pertempuran serta dilakukannya perundingan damai. Indonesia menghendaki perdamaian di dunia bukan konflik serta peperangan. Reaksi Indonesia ini nampak dari pandangan Presiden Joko Widodo yang menegaskan “Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, serta membahayakan dunia” (Widodo, 2022).

Dalam pernyataan resmi lewat media sosial, Jokowi tidak menyebutkan Rusia

maupun Ukraina demikian juga tidak membela salah satu negara (Dharmaputra, 2022). Pernyataannya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari sikap politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam hubungan internasional yang sudah dianut oleh Indonesia. Dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini berarti Indonesia secara bebas bisa memilih serta memastikan kebijakan sendiri tanpa terikat oleh *power* dari pihak manapun

Dalam pernyataan resmi Kemenlu juga termuat poin yang memperlihatkan komitmen pemerintah melindungi keselamatan WNI di daerah konflik. Pernyataan resmi ini menekankan penghormatan kepada prinsip hukum internasional yang berarti adanya penghormatan kepada kedaulatan suatu negara. Invasi Rusia ke Ukraina itu tidak dapat diterima serta sangat mengancam keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia.

Oleh sebab itu dalam pernyataannya, Indonesia secara tegas meminta konflik Rusia dan Ukraina diakhiri dengan cepat tentunya dengan mengedepankan diplomasi perdamaian. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan konflik dengan langkah-langkah nyata. Konflik itu juga mengancam keselamatan WNI yang menetap di Ukraina. Kemenlu telah melaksanakan tindakan untuk mengevakuasi WNI yang juga jadi prioritas utama.

Pernyataan Kemenlu adalah upaya yang layak untuk menunjukkan sikap pro aktif Indonesia dalam menjawab isu-isu dunia. Meskipun demikian, ada poin yang digarisbawahi mengenai kesan pengecaman aksi Rusia dalam melakukan serangan ke Ukraina serta menganggap invasi itu sebagai perbuatan yang tidak diterima. Hal ini dapat merusak pedoman politik bebas aktif dan seakan berpihak untuk koalisi Barat serta akan berpotensi hadapi perbandingan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya.

Penegasan Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang bisa mengancam dunia tanpa menyebut nama negara penyerang serta penyerangan yang telah dilakukan yakni invasi Rusia ke Ukraina tidak dinyatakan secara terbuka oleh Presiden (Junaedi, 2022). Alasan ini dipandang tepat mengingat pasal 1 ayat 3 Piagam PBB. Pasal itu menekankan bahwa negara-negara yang berkonflik harus mengutamakan perdamaian agar nantinya tidak

membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Tetapi tidak sama dengan pernyataan Jokowi, pernyataan Kemenlu yang didasarkan pada alasan pasal 1 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan agar negara-negara di dunia untuk menahan diri dalam masalah hubungan internasional dan menjauhi tindak kekerasan (Atmojo, 2013). Dalam pernyataan resmi Kemenlu yang meraih reaksi negatif, akan tetapi perlu dibanggakan sebab termuat poin yang memperlihatkan komitmen pemerintah melindungi keselamatan WNI didaerah perang.

Indonesia dapat berperan besar dalam mengakhiri pertikaian antara Rusia dan Ukraina dengan meningkatkan dukungan global dalam penghentian konflik. Upaya menyelesaikan konflik dapat dilakukan melalui organisasi dunia seperti forum PBB serta G20. Indonesia pula berperan besar jadi pimpinan G20 sesuai hasil KTT di Roma pada 31 Oktober 2021. Melalui tugas ini, Indonesia dapat melakukan langkah-langkah yang meyakinkan dengan bantuan bersama dari beberapa negara untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina sedini mungkin. Masalah besar ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat, akan tetapi selaku pimpinan G20, Indonesia dipercaya mampu mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu sebagai ketua G20, Indonesia dipercaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menyelesaikan pertikaian antara Rusia dan Ukraina.

Dalam menunjang penelitian ini, peneliti mengkaji terlebih dahulu riset-riset yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan tema dan topik mengenai konflik Rusia dan Ukraina tahun 2022. Riset-riset sebelum itu jadi studi pustaka untuk melakukan riset lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang ingin diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat (2022) dengan judul “Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif *National Interest*”. Penelitian ini membahas Indonesia sebagai bangsa yang menggunakan prinsip bebas aktif menerapkan kebijakan bebas aktifnya dalam konflik internasional kemudian dari itu Indonesia bebas menetapkan perilaku serta tidak mengharuskan diri pada kekuatan khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi (2023) dengan judul “Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina: Sebuah Kajian Tentang *Soft-Power*”. Penelitian ini membahas pertikaian Rusia dan Ukraina menuai akibat buruk ke stabilitas global yang membuat krisis di beberapa negara. Keadaan permasalahan yang belum usai, menyebabkan Indonesia berinisiatif mengakhiri penyerangan lewat Jokowi yang melaksanakan kunjungan ke Ukraina serta Rusia, menjadi penghubung komunikasi kedua negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Saryono, Aulia Fajarianti, Lia Dahlia Kurniawati, Ainun Alfahari Akbariah, Ibnu Abdul Jabar, Fitri Yulyanti (2022) dengan judul “Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina”. Penelitian ini membahas Operasi militer Rusia ke Ukraina semenjak 24 Februari 2022 telah menuai dampak negatif besar seperti memakan banyak korban jiwa, kerusakan bermacam sarana umum, menyurutkan ekonomi beberapa negara, dan membahayakan kedudukan negara yang lain yang turut menyerukan dan memberikan desakan *power* militer terhadap Ukraina.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahbuddin dan Tati Haryati (2022) dengan judul “Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia”. Penelitian ini menerangkan pertikaian antara Ukraina serta Rusia telah terjadi dari tahun 1991. Sudah selesainya Uni Soviet, Ukraina enggan dominasi Rusia dalam *Commonwealth of Independent States* (CIS) maupun Eropa Timur dan memutuskan berhimpun dengan Uni Eropa (UE).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu adapun riset ini fokus pembahasan bagaimana aksi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri invasi Rusia serta Ukraina tahun 2022.

### Kerangka teoritis

Menurut Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin dalam bukunya yang berjudul “*Foreign policy analysis: A toolbox*” (2018) menjelaskan pengertian politik luar negeri ialah bahwa tindakan otoritas politik independen adalah karena dicadangkan untuk negara berdaulat. Misalnya Pemerintah Kanada, Jerman atau Spanyol adalah penjaga

hukum kedaulatan negara mereka dan dari kepribadian internasional negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, negara bagian seperti Quebec, Bavaria atau Catalonia tidak menjalankan kebijakan luar negeri. Mereka bisa menerapkan hubungan internasional oleh yurisdiksi konstitusional mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan kebijakan luar negeri di kancah internasional karena mereka bukan entitas yang berdaulat dan independen. Tentu saja, ada pengecualian di Belgia, misalnya, federalisme cukup terdesentralisasi dan memberikan beberapa yurisdiksi konstitusional eksklusif kepada Wallonia dan Flanders serta hak untuk menandatangani perjanjian hukum internasional di yurisdiksi mereka.

Pendapat yang dijelaskan oleh (Perwita & Yani 2006: 48-49) mengatakan politik luar negeri adalah garis haluan negara dalam berhubungan dengan negara lain bersumber pada nilai, perilaku, arah dan target dalam mempertahankan, melindungi serta memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancah internasional. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki kebijakan serta garis haluan politik luar negeri sendiri terhadap tujuan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri ialah fitur yang dipergunakan dalam melindungi ataupun memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, lewat garis haluan maupun rencana oleh para pengambil kebijakan.

Bagi (Rosenau, 1980) dalam bukunya yang bertema "*The Scientific Study of Foreign Policy*" memaparkan dalam kajian politik luar negeri yaitu selaku sesuatu sistem, dorongan dari area eksternal serta dalam negeri selaku input yang pengaruhi politik luar negeri sesuatu negara ditanggapi oleh para pembentuk pengesahan dalam proses konversi jadi output. Proses konversi yang berlangsung dalam pembuatan politik luar negeri ini mengarah oleh pemaknaan kondisi, baik yang terjadi dalam area eksternal ataupun internal oleh memperhitungkan tujuan yang hendak diraih dan fasilitas, kapabilitas yang diperoleh.

Menurut Holsti tujuan kebijakan luar negeri ialah cerminan menimpa kondisi perkara di masa yang hendak tiba yang hendak dicetuskan pemerintah lewat pembentuk ketetapan. Triknya dengan melancarkan pengaruh di luar negeri serta mengganti ataupun mempertahankan sikap negara lain.

Sesuatu pemerintahan pada umumnya berupaya menciptakan tujuan nasionalnya lewat bermacam metode yang bervariasi antara negara dengan yang lainnya, yang direfleksikan antara lain lewat pembuatan kebijakan luar negerinya. Sebab itu bagi Holsti, tujuan kebijakan luar negeri sesuatu negara wajib bersifat spesifik serta pastinya wajib dicocokkan oleh kebutuhan negara tersebut (Holsti, 1988).

Diplomasi menurut Ernest Satow merupakan penggunaan pengetahuan/nalar serta kebijaksanaan untuk berperilaku sebagai lawan dari hubungan bantuan antara negara-negara, dalam beberapa kasus juga menjangkau hubungan antara otoritas publik, singkatnya dikatakan perilaku sebagai lawan dari komitmen/kewajiban antar negara untuk tujuan yang hubungan yang damai (Satow, 1957).

Lalu menurut (Panikkar, 1995) diplomasi sebagai analisis logis hubungan internasional selaku salah satu penggerak untuk memajukan bangsa, meningkatkan partisipasi, maupun menyebarkan pengaruh ke berbagai negara dalam meraih kepentingan nasional bagi masing-masing negara. Faktanya, diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan publik, sebab diplomasi penting untuk misi dalam meraih kepentingan publik suatu negara. Seperti yang diucapkan KM Panikkar dalam bukunya "*the principle and practice of diplomacy*" , diplomasi dalam kaitannya dengan isu-isu legislatif global adalah kekhususan yang menitikberatkan pada kepentingan suatu bangsa dalam hubungannya oleh bangsa yang berbeda

Selanjutnya menurut Ranny Emilia dari cermin mata kalangan idealis, diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan sesuatu yang melebihi pencapaian materi. Diplomasi berperan dalam memenangkan individu, secara signifikan mempengaruhi pandangan dan perilaku satu sama lain, sehingga masing-masing pihak perlu mencapai harmonisasi dan berharap pada kualitasnya. Memusatkan perhatian pada negara yang hidup berdampingan secara damai, karena itu dunia sebenarnya membutuhkan negosiator dengan kreativitas dan kelihaihan untuk menghentikan keinginan berperang yang jadi sebab akibat masalah dunia (Emilia, 2013).

Dalam (Faizullaev, 2022) menjabarkan Unsur-unsur diplomasi dalam bukunya yang berjudul “*Diplomacy for Professionals and Everyone*”, yaitu sebagai berikut: *Conversation*: Pelaku diplomasi kebanyakan bekerja sama dan berkoordinasi, dan permasalahan yang rumit membutuhkan kerja sama yang maksimal. *Negotiation*: Setiap negosiasi mengandung unsur kerja sama, ketika para pihak memiliki kepentingan atau perbedaan pendapat tetapi ingin mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam diplomasi internasional, negosiasi adalah yang paling umum dan alami. *Dispute*: Diplomasi terkadang dapat menggunakan mode perselisihan interaksi dialogis dan bernegosiasi lebih umum. Diskusi menyiratkan toleransi yang lebih besar dan yang lebih tinggi pandangan, sementara debat melibatkan tingkat tantangan dan kontestasi yang lebih besar. *Rhetoric*: Pidato, bercerita, menyajikan dan mengembangkan narasi, menulis surat dan artikel, dan bentuk retorika lainnya banyak digunakan dalam diplomasi. Namun, retorika dapat dianggap sebagai salah satu metode umum dialogis interaksi jika melibatkan keterbukaan, kemungkinan menerima umpan balik dan keinginan untuk mendengarkan pihak lain. Retorika adalah metode persuasif untuk mengerahkan pengaruh, dan dalam bentuk lisan dan tulisan, itu bisa menjadi bagian dari negosiasi dan perselisihan.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian berupa deskriptif yaitu bekerja dengan cara memeriksa informasi yang telah ditemukan. Eksplorasi subjektif ini juga dapat dilihat sebagai perkembangan proses pemeriksaan yang dapat memberikan garis besar pola pikir induktif dengan membatasi untuk membentuk akhir dari perdebatan. Contoh penalaran induktif ini adalah perspektif untuk membuat kesimpulan (Creswell, 2015: 61). Dalam riset ini, peneliti melibatkan strategi pemilahan informasi dalam dokumentasi dan penambangan informasi berbasis web (Bakri, 2017:171). Memanfaatkan metodologi yang peneliti gunakan ini bisa mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai bagaimana diplomasi Pemerintah Indonesia untuk mengelola konflik

yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tahun 2022.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menjelaskan bagaimana penerapan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam perang Rusia dan Ukraina pada masa kepresidenan G20 Indonesia. Dalam menyusun siapa yang akan berpartisipasi dan agenda apa yang menjadi penekanan KTT tersebut, acara G20 di Bali akan menjadi kontestasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 dan kewajiban kepresidenannya akan menjadi tolak ukur penerusnya dan tantangan terbesar yang akan dihadapi kelompok G20 dalam waktu dekat.

### Mediasi ke Ukraina

Indonesia mengaplikasikan diplomasi terhadap Ukraina, menyusun serta memperkuat kolaborasi, dan perundingan resolusi konflik. Pertemuan diplomatik Indonesia terhadap Ukraina terjadi pada 29 Juni 2022 dimana Jokowi bertemu dengan Zelensky di Istana Maryinsky. Pertemuan ini adalah usaha pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam mereaksi invasi Rusia serta Ukraina, sekaligus menandakan bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina. Pada kunjungan diplomatik ini, Jokowi menjamin Presiden Volodymyr Zelensky bahwa pertemuan tersebut hanyalah dorongan untuk aspirasi dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Ukraina dan menghentikan perseteruan antara kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Zelensky menjawab positif dengan menyebut bahwa dirinya sangat menghargai bantuan dari Indonesia dalam mengupayakan kebebasan serta kemerdekaan Ukraina.

Selain itu dari kunjungan tersebut Indonesia terhadap Ukraina ini adalah memperkuat serta memajukan kolaborasi bilateral. Jokowi menerangkan bahwa tepat pada bulan Juni 2022, ialah perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina (Katriana, 2022). Dan karena itu, kedua negara setuju mempererat kolaborasi bilateral yang sudah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia serta Ukraina sudah setuju memajukan kerja sama bilateral di

bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, budaya, pendidikan, serta pariwisata.

Peran negosiator Indonesia dalam perseteruan ini nampak dari kemauan Indonesia lewat Presiden Joko Widodo yaitu menyampaikan pesan dari Presiden Volodymyr Zelensky, yang dimana diaspirasikan bisa mendapatkan persetujuan damai. Indonesia menyampaikan pesan Ukraina ke Rusia, terutama terkait dibukanya jalur supply chain termasuk ekspor impor pangan, yang mana tidak hanya pengaruhi kedua negara saja tetapi pula dunia internasional.

Kebijaksanaan dan kesepakatan Indonesia dengan Ukraina terus berlangsung, Indonesia pun mengundang Ukraina untuk menuju KTT G20 di Indonesia. Rencananya adalah untuk pemulihan keuangan dunia, dan diharapkan menjadi pekerjaan untuk mengakhiri invasi dan menumbuhkan kekuatan dunia. Melalui Jokowi, Indonesia mengundang Zelensky ke KTT G20 agar kedua negara dapat membahas agenda tersebut secara langsung dan bernegosiasi di bawah arahan negara-negara G20. Indonesia yang merupakan pimpinan G20 memainkan peran yang sangat penting, dimana Rusia adalah salah satu anggota G20. Presidensi G20 2022 yang memiliki rencana fundamental untuk mengkaji kesehatan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia, sebenarnya tidak secara eksplisit membicarakan pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Namun, AS dan mitranya mendorong Indonesia untuk tidak invitasi Rusia, melainkan lebih mendekati untuk invitasi Ukraina, yang bukan anggota G20 2022. Indonesia sebagai tuan rumah, tidak ingin Barat mendikte hal tersebut. Sebagai jalan tengah, Indonesia akan invitasi Rusia dan Ukraina pada Puncak G20 yang rencananya akan digelar pada November 2022. Tugas Presidensi Indonesia pada KTT G20 2022 sangat vital. Dengan cara ini, Jokowi secara efektif berbicara dengan Rusia dan Ukraina untuk mendamaikan kedua negara (Zuhri, 2022).

Kiprah ini ialah salah satu tindakan nyata Indonesia guna proaktif dalam menyelesaikan pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Menjawab invitasi itu, Zelensky menyebut bahwa dirinya menghargai invitasi yang dibagikan dalam turut hadir di KTT G20, namun demikian, Ukraina dapat menjamin

bahwa hal tersebut akan bergantung pada keadaan dan kondisi keamanan di Ukraina. Perihal ini tidak menutup kemungkinan pertemuan kedua negara pada KTT G20, dimana Zelensky menyatakan bahwa adanya agenda ini dapat membantu upaya akhir perang (Asmara, 2022). Joko Widodo juga mempromosikan investasi terkait Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan soal pembangkit listrik tenaga nuklir yang dinilai menjadi salah satu pintu masuk Indonesia untuk menawarkan solusi perdamaian (Saptohutomo, 2022).

Zelensky berterima kasih kepada Jokowi karena telah datang ke Ukraina dan mencatat bahwa ini adalah kunjungan pertama Presiden Indonesia ke negara Ukraina dalam sejarah hubungan diplomatik. Para pemimpin Ukraina hanya mengunjungi Jakarta dua kali pada tahun 1996 (Kuchma) dan pada tahun 2016 (Poroshenko). (Lb.ua, 2022). Presiden Ukraina menekankan pentingnya peran Indonesia dan kewibawaan pribadi Presiden Joko Widodo di kancah internasional. Menurut Presiden Volodymyr Zelensky perundingan dengan Presiden Indonesia saat itu merupakan langkah untuk memperkuat koalisi negara-negara antiperang global yang dapat memulihkan dan menjamin stabilitas dunia. Presiden Ukraina berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya yang terus-menerus terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara bersama (Офіс Президента України, 2022).

Selama agenda terjadi, setidaknya ada empat pokok bahasan utama yang didiskusikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky. Berikut rangkumannya : (1) Memajukan perdamaian. (2). Bawa pesan terhadap Putin, (3). Biaya makanan pokok serta Energi. (4) Menghadiri KTT G20 di Bali.

### **Mediasi ke Rusia**

Menjelang dimulainya pertikaian Rusia serta Ukraina, reaksi awal Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri ialah mengutuk invasi tersebut tanpa mengatakan bahwa Rusia penyerang. Indonesia sendiri mengumumkan yaitu Rusia serta Ukraina untuk segera mentutaskan permasalahan itu dalam jangka waktu yang. Lewat pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo pula mengatakan bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan kendala proses pemulihan perdagangan dunia pasca pandemi (Storey & Choong, 2022). Jenis dari

pernyataan resmi oleh kepala negara serta Kementerian Luar Negeri itu adalah upaya pertama Indonesia mengimplementasikan penegasannya ke pihak yang berkonflik, terutama Rusia.

Sejak awal operasi khusus Rusia, otoritas Ukraina telah berulang kali menganjurkan negosiasi antara Putin serta Zelensky. Sekretaris pers pemimpin Rusia mengatakan bahwa Moskow tidak menentang pertemuan semacam itu, tetapi untuk itu para pihak di tingkat delegasi harus menyiapkan dokumen yang penting untuk ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara. Rusia dan Ukraina telah menegosiasikan penyelesaian sejak akhir Februari. Setelah pertemuan delegasi kedua negara di Istanbul, Kyiv menyerahkan sejumlah proposal ke Moskow, termasuk status Ukraina non-blok dan non-nuklir. Belakangan, seperti yang dilaporkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kyiv mulai menyimpang dari perjanjian Istanbul dan negosiasi menemui jalan buntu. Pada akhir April, negosiasi dihentikan, hal ini dikonfirmasi oleh kedua belah pihak (Соколов, 2022).

Sebelumnya Jokowi menghubungi Putin pada 28 April 2022. Sama perihalnya percakapan dengan Zelensky, Putin juga memberikan update kabar terkini di Ukraina menurut versinya. Pada 30 Juni 2022, Jokowi menemui Putin di Istana Kremlin dalam rangka membicarakan mengenai isu kemanusiaan dan upaya menghentikan permusuhan kedua negara tersebut, sembari memberikan dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yaitu 1) Mengaplikasikan persuasi ke Putin untuk membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina, 2) Mengundang Putin dalam menghadiri KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 (Strangio, 2022).

Kunjungan Presiden RI ke Rusia adalah upaya dalam mewujudkan amanat konstitusi Indonesia dalam berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia, maka dari itu tak lupa pula Jokowi mengirimkan pesan dari Zelensky ke Putin sesuai oleh konvensi yang dibagikan Jokowi ke Ukraina. Dalam perihal ini, Indonesia berkeinginan menjadi jembatan penghubung antara pembicaraan kedua negara. Putin menunjukkan minat pada topik penyelesaian krisis di Donbas dan berjanji untuk memberitahunya tentang visinya

mengenai masalah itu. Jokowi pula mengatakan kekhawatirannya ke Putin akan rantai pasok pangan yang terancam sebab terdapatnya konflik ini. Oleh sebab itu diharapkan permasalahan yang berakibat negatif terhadap kemanusiaan ini agar bisa cepat menemui titik terangnya (Kementerian Luar Negeri RI, 2022).

Peraihan kedua tujuan itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, seraya memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia menegaskan pesan dan perhatiannya ke konflik yang mengakibatkan krisis keamanan serta pula kemanusiaan. Indonesia pula merayu Rusia supaya kembali menyalakan semangat damai serta multilateralisme, terutama mengenai perihalnya guna memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang sudah kacau sebab dari invasi.

Hasil dari agenda itu, Putin bersetuju membuka jalur ekspor gandum Ukraina serta membagikan jaminan suplai terhadap komoditas pupuk Rusia dalam usaha guna pengukuhan kedua komoditi itu ke dalam rantai pasok dunia (Rasdiyanah, 2022).

Dari pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Presiden Vladimir Putin, Rusia bersiap membuka lorong makanan pokok, khususnya melalui jalur laut. Selama ini dunia menyebut Rusia sebagai kontributor isu tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo dengan masuk ke konflik pangan ini, perlu menjadikan Rusia bagian dari pengaturan tersebut.

Darurat pangan harus diselesaikan bersama. Dalam laporan FAO sejak Juni 2022 dinyatakan bahwa bahaya darurat pangan dunia pada tahun 2022 akan jauh lebih menekan akibat invasi Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki batasan ekspor pupuk dan makanan pokok, tahun 2021 Rusia memasok 40 juta ton gandum untuk sektor bisnis asing, pada tahun 2022 siap menyediakan 50 juta ton (Vedomosti.ru, 2022). Presiden Vladimir Putin menegaskan setidaknya beberapa kali bahwa ketidakmerataan di pasar makanan pokok dunia ialah akibat langsung dari strategi ekonomi makro yang tidak dapat diandalkan dari negara-negara tertentu serta pengumpulan

utang tanpa agunan. Pandemi Covid juga memperburuk keadaan.

Presiden Vladimir Putin menekankan, Rusia telah dan tetap menjadi salah satu produsen dan pengeksport makanan pokok dunia. Pengiriman produk pertanian Rusia dilakukan di 161 negara di dunia. Tahun 2021, lebih dari 43 juta ton biji-bijian dieksport dan gandum 33 juta ton. Tahun 2022 Rusia memperkirakan panen biji-bijian yang unggul, yang akan memberi Rusia kesempatan untuk meningkatkan pengiriman Rusia ke pasar luar negeri hingga 50 juta ton produk terkait. Indonesia membutuhkan pupuk Rusia dan Rusia tidak menyembunyikannya. Kemudian Presiden Vladimir Putin menyatakan dengan cara yang sama, yaitu Rusia siap untuk sepenuhnya memenuhi permintaan petani dari Indonesia dan negara sahabat lainnya ialah pupuk nitrogen, fosfor, kalium dan bahan baku untuk produksi mereka. Seperti diketahui, pangsa Rusia di pasar pupuk mineral dunia adalah 11%, dan untuk beberapa item melebihi 20%. Tahun 2021, 37 juta ton produk ini dikirim ke luar negeri (Колесников, 2022).

Presiden Vladimir Putin juga konfirmasi kehadiran Rusia di KTT G20 yang akan datang secara tatap muka ataupun lewat daring (Teslova, 2022). Selain itu Rusia pula menawarkan partisipasi di bidang peningkatan transportasi kereta api serta energi nuklir untuk Ibukota Nusantara (IKN) nanti (Ho, 2022). Presiden Vladimir Putin menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah salah satu mitra utama Rusia di Asia-Pasifik. Hubungan antara Rusia dan Indonesia produktif dan umumnya saling membantu dan terus terjalin berdasarkan praktek panjang persahabatan dan bantuan bersama. Presiden Vladimir Putin mengingatkan bahwa negara Rusia membantu Indonesia dalam membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di panggung dunia. Dalam acara tersebut, Presiden Vladimir Putin menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Rusia sudah cukup lama menghasilkan di Indonesia sampai sekarang. Dengan kerja sama para ahli, spesialis, dan pengembang Rusia, penunjang kendaraan dan prasarana modern yang sangat besar, arena, klinik darurat, dan organisasi penting lainnya banyak di antaranya berfungsi hingga saat ini. Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa perbincangan

bersama Jokowi diterapkan oleh metode bisnis yang sangat besar.

Presiden Rusia memusatkan perhatian pada perdagangan serta partisipasi keuangan yang menunjukkan positif. Pada tahun 2021, contoh ekonomi timbal balik meningkat lebih dari 40%, dan meningkat lebih dari 65% dalam lima bulan pertama tahun 2022. Dalam situasi khusus ini, kedua belah pihak menyampaikan minat komisi bersama untuk ekonomi serta teknik.

Lebih lanjut Presiden Vladimir Putin berbicara bahwa lebih banyak peluang untuk membangun lembaga keuangan yang berharga secara umum dan menambahnya jumlah perdagangan komersial antar negara. Presiden Rusia menyatakan bahwa Rusia menghubungkan signifikansi untuk membuat zona deregulasi antara Indonesia dan Asosiasi Moneter Eurasia. Presiden Vladimir Putin berharap diskusi tentang draf pemahaman yang akan diadakan sebelum akhir tahun 2022 akan terbukti berhasil. Kedua belah pihak ada minat untuk mengembangkan industri tenaga atom nasional, oleh pengalaman baru, kemampuan dan inovasi yang tak tertandingi, yaitu *Rosatom State Corporation* akan berpartisipasi bersama Indonesia, termasuk yang berhubungan dengan pemanfaatan inovasi atom non-energi, contoh dalam kedokteran serta pertanian (Yulianingsih, 2022).

Presiden Rusia tersebut mengatakan, Rusia memiliki berbagai upaya bersama bisnis yang potensial dalam kemajuan landasan transportasi dan operasi. Misalnya, Kereta Api Rusia bisa mengambil bagian dalam mengimplementasikan upaya besar-besaran Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan. Moskow, ibu kota Rusia, yang telah bertumbuh oleh kemajuan yang sangat baik serta oleh kenaikan yang luar biasa, juga dapat mengambil bagian dalam proyek yang sangat besar ini.

Selama diskusi Jokowi dengan Putin, mereka juga berfokus pada area partisipasi penting seperti kemanusiaan, sosial, industri perjalanan, serta pendidikan. Dalam kolaborasi kemanusiaan ialah memperluas komunikasi antar negara serta antar agama yang ketat dengan mengingat bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dalam hal populasi. Presiden Vladimir Putin mencatat



bahwa baru-baru itu sebuah panggilan dari distrik Muslim Rusia mengunjungi Jakarta. Bidang lain yang menjanjikan yaitu memfasilitasi pembatasan anti-Virus Corona bagi para wisatawan dan keputusan tanpa visa yang sedang berlangsung akan menambah itu. Presiden Indonesia dengan Presiden Rusia juga meninjau peluang untuk melanjutkan layanan udara langsung antara Moskow dan pulau hotel Bali. Kedua Presiden juga berbicara tentang beberapa masalah teritorial dan dunia yang mendesak lainnya. Presiden Joko Widodo menginformasikan Putin secara mendalam tentang pertumbuhan di Ukraina.

Dalam konferensi pers bersama dengan Putin, Jokowi menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mempunyai kepentingan sama sekali, selain ingin segera mengakhiri konflik dan jaringan persediaan pangan, pupuk, dan energi dapat diperbaiki dengan cepat karena mencakup keberadaan sejumlah besar orang, bahkan miliaran manusia (Hermawan, 2022). Presiden Vladimir Putin menyatakan sangat senang hati mengundang Jokowi di Istana. Inilah kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Moskow sebagai Presiden. Menurut Presiden Vladimir Putin, Rusia dan Indonesia berupaya untuk mengoordinasikan posisi di PBB dan asosiasi global lainnya, termasuk Hubungan Negara-negara Asia Tenggara yang akan dipimpin Indonesia pada tahun 2023. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa kebetulan Presiden Jokowi berpartisipasi di KTT BRICS sebagai pengunjung.

Putin mengungkapkan Rusia sangat menjunjung tinggi usaha Indonesia serta Joko Widodo untuk merencanakan pertemuan G20 yang direncanakan di Indonesia pada tahun 2022. Presiden Rusia itu kemudian mengatakan sebagai penutup, ia ingin mengatakan terima kasih ke Jokowi untuk diskusi yang bermanfaat. Ia yakin konvensi yang ada saat itu juga akan memajukan organisasi yang beragam antara Rusia serta Indonesia. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kunjungan Presiden RI ke Rusia merupakan salah satu bentuk pemenuhan kepentingan dalam negeri, bagaimanapun juga tidak ada kepentingan tertentu di balik kunjungan tersebut.

Jokowi telah menyelesaikan kunjungannya ke Rusia dan Ukraina dalam menyelesaikan pertempuran tersebut. Jokowi ingin kedua negara mengakhiri konflik. Sebab, perang antar kedua negara sejak Februari 2022 telah menyebabkan darurat makanan pokok dunia yang dikhawatirkan akan merembet ke Indonesia. Namun, upaya menghentikan permusuhan yang di bawa Jokowi belum membuahkan hasil. Perang masih senantiasa terjadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas angkat bicara, Airlangga menyampaikan kunjungan Jokowi ke Ukraina serta Rusia utamanya ialah melindungi rantai makanan pokok dunia supaya tetap lancar. Airlangga mengatakan, Jokowi enggan ancaman darurat pangan terus berlanjut. Apalagi, selama invasi terjadi dalam empat bulan terakhir, rantai makanan pokok dunia kedua negara terhambat (Asmara, 2022).

Pada akhirnya Rusia masih tidak ingin mengakhiri pertikaian di Ukraina. Ini terbukti dari tindakan militernya di Ukraina yang sekarang semakin ganas. Prioritas Rusia saat ini bukan damai akan tetapi untuk secara militer taklukkan dan kuasai Ukraina. Urusan Ukraina hanya dibahas sedikit saja oleh Putin, Presiden Rusia itu lebih banyak berbicara masalah hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina lebih kepada misi penyelamatan citra Indonesia selaku Presidensi G20. Sebagai presidensi G20, Indonesia mempunyai tanggung jawab melindungi kekompakan seluruh anggota forum tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi penengah yang dapat dipercaya kedua pihak, tapi tampaknya Indonesia belum punya konsep terkait yang komprehensif dalam bagaimana penyelesaian konflik yang adil dan mengacu pada hukum internasional.

### **Diplomasi Forum G20**

Indonesia menjadi presidensi G20 untuk pertama kalinya, ini termasuk menjadi tuan rumah KTT G20 yang diadakan pada 15-16 November 2022. Kepresidenan Indonesia datang pada masa-masa sulit, karena dunia perlahan pulih dari pandemi global Covid-19 dan di ambang Perang Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung. Indonesia memegang tanggung jawab sebagai presiden G20 untuk

menjadi kemudi kelompok yang terdiri dari 19 ekonomi teratas dunia dan UE untuk menjembatani kepentingan bersama di antara anggota guna mengatasi isu-isu global yang sedang berlangsung. Di dalam G20 sendiri, ada negara-negara yang mengambil sikap keras mengutuk tindakan yang diambil Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Hal ini menyebabkan ketidakpastian seputar KTT karena ada negara-negara yang tidak mendukung kehadiran Rusia. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa sikap negara terhadap konflik yang sedang berlangsung tidak akan diintervensi oleh negara lain dan tetap tidak memihak. Kementerian Luar Negeri secara konsisten menyatakan akan mengundang semua negara anggota G20 tanpa terkecuali. Presiden Joko Widodo memastikan negaranya tetap imparial dalam konflik dan kebaikan yang lebih besar dalam politik global yang menjadi pembahasan utama KTT G20 dan bukan geopolitik. Indonesia juga melangkah jauh dengan mengundang Ukraina ke KTT G20 di tengah tekanan yang dihadapi oleh Indonesia yang memang mengundang banyak pertanyaan (Strangio, 2022).

Lantas, apa arti semua itu bagi kepresidenan Indonesia di G20? Dengan tagline “*Recovering Together, Recovering Stronger*”, pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa momentum KTT G20 tidak terbawa oleh isu geopolitik yang sedang berlangsung sehingga banyak isu global lainnya yang sedang berlangsung tidak dibahas dalam KTT di bulan November 2022. Meski Perang Rusia dan Ukraina memang menambah tantangan bagi G20, ada dimensi masalah lain yang harus dihadapi bersama. Merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui sherpa KTT untuk memastikan diskusi yang bermanfaat pada November 2022. Tantangan ini dapat memperkuat pengaruh Indonesia tidak hanya sebagai kekuatan regional tetapi juga global. Arah agenda pada bulan November sangat bergantung pada tangan Indonesia untuk memimpin KTT yang dapat menghasilkan yang bermanfaat bagi kebaikan dunia. Isu-isu yang berkisar dari keterlibatan perdagangan antar anggota terutama di era pemulihan pasca-Covid19 dan energi

terbarukan, semuanya ada di meja diskusi (Suoneto & Harsono, 2022).

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Sejak Rusia menginvasi Ukraina itu berakibat dampak global. Sementara Barat telah bersatu dalam dukungannya untuk Ukraina pada tingkat yang berbeda-beda, banyak pihak lain tampak ragu untuk menyalahkan Rusia atas perilakunya. Selain menjatuhkan hukuman ekonomi sepihak terhadap Rusia dan pengusiran massal diplomat Rusia, negara-negara Barat telah membantu Ukraina dengan persenjataan. Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Australia dan anggota Uni Eropa telah menyarankan agar Rusia dikeluarkan dari KTT karena invasinya ke Ukraina. Menempatkan Indonesia negara tuan rumah KTT G20 tahun ini menjadi perhatian (Karman, 2022).

Terlepas dari situasi yang menantang dan masalah yang kompleks, Presiden Joko Widodo sebagai Presiden G20 dan anggota Kelompok Penanggulangan Krisis Global Sekjen PBB, telah memutuskan untuk berupaya memberikan kontribusi daripada berdiam diri. Meskipun Ukraina bukan anggota G20, ketua kelompok tersebut memiliki wewenang untuk mengundang negara tersebut. Dalam upaya meredakan ketegangan, Indonesia mengundang Ukraina ke pertemuan tersebut meski bukan anggota G20. Beberapa negara telah memperingatkan untuk memboikot jika Presiden Vladimir Putin hadir. Jokowi telah mengundang Putin, anggota G20 dan Zelensky sebagai peninjau KTT G20, meskipun ada tekanan dari beberapa negara Barat untuk mengecualikan Presiden Vladimir Putin. Di sisi lain, negara non-Barat seperti China mencoba melobi Indonesia untuk menghapus konflik dari agenda pertemuan puncak kelompok di Bali itu karena harus tetap pada masalah ekonomi. Namun demikian, Indonesia juga tidak bijaksana untuk mengikuti jejak China dan menghapus konflik dari agenda G20 demi kepentingan agenda ekonomi. Perang Rusia dan Ukraina menurut beberapa para ahli ekonomi di Indonesia, mungkin akan menjadi topik yang tidak bisa dihindari. Sebab, perang telah memperparah krisis ekonomi global, terutama menyebabkan perubahan harga komoditas dan minyak.

Selain itu, lebih dari separuh anggota G20 telah dengan tegas bersekutu dengan salah satu pihak yang berperang. Sebaliknya, pertemuan G20 dapat menjadi katalisator bagi Indonesia untuk menunjukkan dukungan konkritnya terhadap proses perdamaian dengan bertindak sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina.

Indonesia memiliki suara penting di panggung global sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia dan sekutu baik Rusia dan Ukraina. Usai pertemuan G7 di Jerman, Jokowi melakukan perjalanan ke Kyiv dan Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Zelensky dan Putin. Dengan kunjungannya ke Rusia dan Ukraina, Presiden Indonesia dari G20, Joko Widodo, menunjukkan bahwa negaranya memimpin dalam mempromosikan perdamaian, mengakhiri bencana kemanusiaan di Ukraina dan menghilangkan potensi krisis pangan global. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam apa yang dapat disepakati kedua negara yang bertikai untuk mencapai gencatan senjata. Inisiatif Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945, tercermin dalam kunjungan tersebut. Alhasil, Presiden melakukan kunjungan dengan tetap menjaga politik luar negeri bebas aktif.

Dengan bertindak sebagai mediator perdamaian yang praktis dan strategis antara Rusia dan Ukraina sambil memegang kursi kepresidenan G20, Indonesia dapat membangun kesuksesan sebelumnya. Dengan bertindak sebagai perantara yang dapat dipercaya, Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya dalam menegakkan perdamaian global dan meningkatkan reputasi (Karman, 2022).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hadir pada KTT G20 dan berbicara melalui tautan video. Dia menyuarakan 10 proposal formula perdamaian Ukraina yang akan membantu mengakhiri perang yang dimulai oleh Rusia secepat mungkin (Лисогор, 2022). Selama pidato online di sela-sela KTT G20, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa sudah waktunya untuk menghentikan permusuhan, dia menambahkan bahwa Ukraina tidak akan setuju untuk menandatangani perjanjian yang mirip dengan

Minsk-3. Menurutnya, Kyiv memiliki rencana untuk mencapai perdamaian sendiri. Presiden Volodymyr Zelensky menyuarakan visinya tentang langkah-langkah pemulihan perdamaian di Ukraina, yang terdiri dari 10 poin formula perdamaian Ukraina :

1. Keselamatan Radiasi Dan Nuklir,
2. Ketahanan Pangan Dan Energi,
3. Pembebasan Semua Tahanan,
4. Pemulihan Integritas Wilayah Ukraina,
5. Penarikan Pasukan Rusia Dan Penghentian Permusuhan,
6. Pengembalian Keadilan,
7. Melawan Ekosida,
8. Pencegahan Eskalasi,
9. Merekam Akhir Perang.

Kalau pun memenuhi persyaratan tertentu yaitu memastikan keamanan nuklir, pangan dan energi, lalu orang yang ditahan sesuai dengan formula "semua untuk semua" dan pemulihan integritas wilayah Ukraina, negosiasi dengan Federasi Rusia dimungkinkan. Dengan demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky percaya bahwa format perjanjian biji-bijian dapat digunakan untuk negosiasi dengan Rusia setelah berakhirnya permusuhan. Menurutnya, para pihak harus menandatangani dokumen yang menegaskan berakhirnya permusuhan. Ada PBB dan dua pihak dalam perjanjian. Di satu sisi Ukraina, Turki, dan PBB, di sisi lain Rusia, Turki, dan PBB.

Presiden Volodymyr Zelensky mengingatkan kembali bahwa Kyiv bersikeras untuk memberikan jaminan keamanan internasional dan telah mengembangkan draf dokumen terkait. Presiden Ukraina itu mengatakan, Kita harus mengadakan konferensi keamanan internasional Kyiv untuk mengkonsolidasikan elemen kunci dari arsitektur keamanan di ruang Euro-Atlantik, termasuk jaminan untuk Ukraina, katanya, seraya menambahkan bahwa hasil utama dari konferensi ini. Menurut rencana Kyiv, harus penandatanganan "Perjanjian Keamanan Kyiv ". Menurut pemimpin Ukraina, Kyiv siap mengadakan acara ini kapan saja, bahkan tahun 2022.

Pemimpin Ukraina juga mencatat bahwa Kyiv ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional untuk mengkompensasi Ukraina atas kerugian akibat permusuhan dengan mengorbankan aset. Presiden Ukraina,

Volodymyr Zelensky, juga mengusulkan pengiriman misi pakar PBB ke fasilitas infrastruktur energi Ukraina untuk menilai kehancuran dan kebutuhan pemulihan serta untuk mencegah kehancuran lebih lanjut.

Sedangkan dari Pihak Rusia yaitu Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov hadir secara langsung sedangkan Presiden Vladimir Putin tidak hadir maupun daring dan tatap muka. Lalu dalam forum G20 itu Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia mengemukakan, Rusia mencatat bahwa baik Amerika Serikat dan semua sekutunya cukup agresif selama diskusi, menuduh Rusia melakukan agresi tanpa alasan terhadap Ukraina. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sekali lagi menyatakan bahwa menurut Federasi Rusia, ini bukanlah agresi oleh Rusia, tetapi operasi untuk melindungi kepentingan keamanan Rusia yang sah yang di perbatasannya terdapat ancaman militer dan operasi untuk melindungi penduduk Rusia di Donbas.

Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov lebih lanjut menyatakan bahwa Uni Eropa dan NATO telah lama ikut serta dalam konflik hibrida, perang hibrida di Ukraina ini termasuk pasokan senjata dan pelatihan personel militer.

Selain itu, pihak Rusia mengklaim bahwa Rusia tidak menolak negosiasi dengan Ukraina. Tetapi Rusia menolak negosiasi konstruktif. Moskow mencari dalam bentuk ultimatum untuk memenuhi tuntutan sendiri yang tidak dapat diterima oleh pihak Ukraina. Hanya dengan persyaratan ini dan semua masalah di penyelesaian situasi di Ukraina berasal dari Kyiv, yang secara resmi menolak negosiasi dengan Moskow untuk menerima persyaratan ultimatum. Tetapi pada saat yang sama mengedepankan kondisi yang tidak memadai untuk inisiasi mereka, yaitu menawarkan persyaratannya sendiri.

Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, menyebut pidato Presiden Volodymyr Zelensky di KTT G20 adalah sebuah pertunjukan yang melampaui semua peraturan dan kesopanan, yang dengannya Barat mencoba mengalihkan perhatian dari agenda nyata G20. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia juga mencatat bahwa Federasi Rusia ingin melihat bukti nyata bahwa Barat

tertarik untuk mendisiplinkan Presiden Volodymyr Zelensky (Dzen.ru, 2022).

Sesi foto bersama tradisional di KTT G20 yang diadakan di pulau Bali, Indonesia, telah dibatalkan. Hal ini dilaporkan oleh agensi Kyodo pada 14 November dengan mengacu pada penyelenggara. Seperti yang diklaim, alasannya adalah ketidaksepakatan para peserta terkait situasi di Ukraina dan tuduhan terhadap Federasi Rusia. Perwakilan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menolak untuk mengambil gambar sehubungan dengan keikutsertaan delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dalam acara tersebut. Fotografi bersama di KTT G20 dibatalkan untuk pertama kalinya.

Mengenai hasil dari diskusi konflik Rusia dan Ukraina, 18 atau 19 negara mengeluarkan komunike yang secara langsung mengutuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Pernyataan bersama yang mengutuk ini tidak mungkin terjadi karena posisi China dan Rusia. Karenanya pada 15 November 2022, kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Federasi Rusia bersikeras bahwa deklarasi akhir KTT G20 berisi ungkapan bahwa posisi di Ukraina berbeda.

Delegasi India di KTT G20 memainkan peran penting dalam mencapai konsensus di antara para peserta KTT, setelah beberapa hari ketidaksepakatan antara pejabat dari negara-negara Barat dan pejabat dari Rusia dan China tentang masalah penyebutan Rusia yaitu operasi militer khusus di Ukraina dalam teks deklarasi akhir. Pada saat yang sama, draf pernyataan tersebut menyebutkan "perang di Ukraina" dan bukan "perang Rusia di Ukraina", yang merupakan solusi kompromi yang diperlukan untuk persetujuan negara-negara G20.

Dengan demikian, para pemimpin negara-negara G20 menyimpulkan KTT di pulau Bali, Indonesia dan merangkum hasilnya dalam komunike bersama. Dalam dokumen tersebut, mayoritas anggota G20 mengutuk konflik di Ukraina, tetapi ada pendapat lain tentang situasi dan sanksi ini. Pentingnya kesepakatan biji-bijian dan tidak dapat diterimanya ancaman untuk menggunakan senjata nuklir dan penggunaan langsungnya juga ditekankan..

Ketentuan komunike akhir G20 mengenai Ukraina:

1. Negara-negara G20 mencatat bahwa konflik di Ukraina telah memperburuk masalah ekonomi dunia yang ada,
2. Sebagian besar negara G20 mengutuk aksi militer di Ukraina, tetapi ada juga pendapat lain tentang situasi ini,
3. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima (Bbc.com, 2022).

Upaya utama para pihak ditujukan melibatkan China dalam penyelesaian konflik Ukraina yaitu ada permintaan dan proposal dari China untuk mempengaruhi Rusia sebagai kekuatan penstabil untuk mengubah posisi agresif Moskow guna ultimatum ke Ukraina yang lebih konstruktif untuk kesempatan memulai proses negosiasi.

Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping dalam rumusan berikut: masyarakat internasional harus menciptakan kondisi untuk proses perdamaian, Beijing pada gilirannya akan terus melakukan upaya konstruktif, otoritas China bermaksud untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah Ukraina dengan metode mereka sendiri. Apa inti dari metode ini saat ini tidak diungkapkan.

Sebaliknya, China mungkin mengandalkan pengaturan ulang hubungan dengan Barat dalam kondisi realitas baru yaitu persaingan, kondisi utamanya adalah tidak mengisolasi China, yaitu memastikan stabilisasi global ekonomi dengan syarat bahwa Cina juga terlibat dalam proses.

Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi konflik Rusia dan Ukraina, akan tetapi mungkin karna masih menjunjung tinggi Kemandirian dan Aktif politik luar negerinya sebagai negara yang berdiri nonblok di dunia saat ini. Namun kondisi perang Rusia dan Ukraina telah berdampak pada kondisi sistem politik internasional dimana terdapat nonblok negara memilih untuk berpihak pada salah satu negara adidaya seperti AS, Rusia, dan China. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi Indonesia saat ini harus mampu mengikuti tantangan perubahan sistem politik internasional, khususnya sebagai negara gerakan nonblok di dunia.

Secara keseluruhan, perubahan sistem politik Internasional secara drastis mempengaruhi kebijakan luar negeri semua negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia di

dalamnya. Untuk mengikuti tantangan tersebut, Indonesia harus memilih antara berpihak pada salah satu negara adidaya atau tetap menjadi negara gerakan nonblok yang begitu banyak keterpurukannya di dunia saat ini apalagi tujuan gerakan nonblok hanya menjadi negara nonblok.

#### 4. KESIMPULAN

Indonesia melakukan langkah diplomasi menghadapi konflik Rusia dan Ukraina berlandaskan kepada prinsip politik luar negeri Indonesia yang cinta damai, selain Indonesia bergerak dalam menciptakan perdamaian karena sebagai Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. Berdasarkan analisis dalam skripsi mengenai Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia Dan Ukraina Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Kegagalan G7 untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi dunia saat itu berujung pada berdirinya G20. Misi G20 adalah untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Pasca pandemi COVID-19, tahun 2022 menjadi tahun penting bagi pertumbuhan global berbagai negara. Kepresidenan G20 Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar akibat dari kondisi politik dan ekonomi dunia, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan posisi politik dunia muram. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa “bebas dan aktif” adalah politik luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia untuk mendukung terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, bukan kebijakan netral. Sebagai salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi PBB yang menuntut Rusia berhenti menyerang Ukraina, bukan berarti Indonesia berpihak pada Barat, tetapi Indonesia akan terus mendesak agar penggunaan aksi militer dihentikan karena hal itu akan mengakhiri perang. Kepresidenan Indonesia di G20 akan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemain regional yang penting bagi masyarakat dunia.

Kedua, Indonesia melakukan diplomasi perdamaian dengan mengunjungi Ukraina

terlebih dahulu, Presiden Indonesia dan sekaligus ketua G20 Joko Widodo mengunjungi Ukraina pada tanggal 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendesak resolusi damai untuk konflik itu.

Ketiga, Indonesia juga melakukan mediasi ke Rusia pada tanggal 30 Juni 2022. Sebagai presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berusaha untuk tetap netral dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina dan berhati-hati dalam komentarnya. Presiden Joko Widodo mengatakan dia menawarkan dukungan Indonesia dalam upaya perdamaian kepada Presiden Vladimir Putin, sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menyatukan forum G20 yang terpecah oleh konflik yang sedang berlangsung.

Keempat, Indonesia mengangkat isu perang Ukraina dan Rusia di forum G20 untuk mendorong terjadinya perdamaian. Dalam situasi ini, Indonesia tidak mendukung Rusia atau Ukraina. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara hanya mendukung upaya untuk mempromosikan perdamaian internasional dan mengakhiri kemanusiaan tragedi, dan tidak memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina atau mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Indonesia telah memilih untuk menghindari perang terbuka dengan negara-negara besar dan menolak untuk mendukung satu pihak sambil memprovokasi pihak lain berdasarkan prinsip dan komitmennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afriansyah, A. (2004). *Praktik Diplomasi*.  
Alden, C., & Aran, A. (2016). *Foreign policy analysis: new approaches*. Routledge.  
Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Gramedia Pustaka Utama.  
Berridge, G. R. (2021). *Diplomacy: theory and practice*. Springer Nature.  
Cantir, C., & Kaarbo, J. (2016). Unpacking Ego in Role Theory: Vertical and Horizontal Role Contestation and Foreign Policy 1. In *Domestic role contestation, foreign policy, and international relations* (pp. 1-22). Routledge.  
Constantinou, C. M., Kerr, P., & Sharp, P. (Eds.). (2016). *The SAGE handbook of diplomacy*. Sage.

Ivan Yulivan, S. E., & MM, M. *Politik Luar Negeri*. Jakad Media Publishing.

- Jones, P. (2015). *Track two diplomacy in theory and practice*. Stanford University Press.  
Mas'oeed, M. (2021). *Isu dan aktor politik luar negeri*. UGM Press.  
Montratama, I. (2017). *Quo Vadis politik luar negeri Indonesia*. Elex Media Komputindo.  
Most, B. A., & Starr, H. (2015). *Inquiry, logic, and international politics*. Univ of South Carolina Press.  
Palmer, G., & Morgan, T. C. (2011). A theory of foreign policy. In *A Theory of Foreign Policy*. Princeton University Press.  
Rana, K. S. (2011). *21st-century diplomacy: A practitioner's guide*. Bloomsbury Publishing USA.  
Setiawan, A. (2016). *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi*.  
Setiawan, A., & Sulastri, E. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UM Press.  
Tamma, S. (2021). *Buku Ajar Politik Luar Negeri*. Makassar:Unhas Press.  
Trihartono, A., Hara, A. E., & Pamungkas, F. Z. *Diplomasi Publik: Memenangkan Hati dan Pikiran*.  
Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.  
Wuryandari, G., Mashad, D., Yustiningrum, R. E., Alami, A. N., & Sriyanto, N. (2015). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi.  
Yumetri Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*.
- ### Penelitian
- Munaiseche, A. R. (2022). *Alasan Rusia Melakukan Invasi Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ### Jurnal dan Artikel
- Andriani, R., & Attata, J. W. Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina.  
Atok, F. (2022). Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 4(1), 11-15.  
Dharmaputra, R. (2022). Understanding Indonesia's Response to Russia's war in Ukraine. *Journal Of Global Strategic Studies*, 2(1), 115-128.  
Daniel, J., & Permanasari, A. (2022). Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap

- Perjanjian Persahabatan Antar Rusia Dan Ukraina. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 4(1), 49-58.
- Hamsyir, H., Setyoko, B., & Marihot, M. (2022). Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia Dan Ukraina Tahun 2014: Tinjauan Aspek Strategi Dan Hubungan Internasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 248-254.
- Hendra, Z., Musani, I., & Samiaji, R. (2021). Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia Dengan Ukraina Tahun 2014 Di Tinjau Dari Aspek Strategi Dan Hubungan Internasional Serta Manfaatnya Bagi TNI AL. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 730-746.
- Hidriyah, S. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. *Info Singkat*, 7-12.
- Junaedi, J. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on Grace Indonesia-Russia Diplomacy Relations. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(1), 27-40.
- Мамішова, Н. (2022). Türkiye's policy on Russia-Ukraine war: Geopolitical legsplit in action. *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*, (3 (14)), 31-43.
- Pujiyanti, A. (2014). Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. *Info Singkat*, 5-8.
- Putra, I. K. A. A., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Dantes, K. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 260-268.
- Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Invasi Rusia Ke Ukraina.
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386-397.
- Shah, P., & Gedamkar, P. P. (2022). Effects Of Russia-Ukraine War. *Interantional Journal of Scientific Research In Engineering And Management*, 06(03). <https://doi.org/10.55041/ijrsrem11973>.
- Sudiq, R. D., & Yustitiantingtyas, L. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101-117.
- Syuryansyah, S., & Berthanila, R. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal PIR : Power in International Relations*.
- Tyaswana, A. S. R., & Saputra, G. R. D. Peran Jerman dalam Mediasi Implementasi Protokol Minsk.
- Widiasa, R. (2018). Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 60-76.
- Yuniati, S. Faktor-Faktor Penyebab Krisis Politik di Ukraina.
- Dokumen dan Sumber Online**
- Akhmad Hanan. (2022). *Bersama-sama Mengupayakan Perdamaian Rusia dan Ukraina*. Cnbcindonesia.com. 13 April 2022. Diakses 24 Maret 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220413115900-14-331310/bersama-sama-mengupayakan-perdamaian-rusia-dan-ukraina>
- Ahmad Syaifuddin Zuhri. (2022). *Misi Damai Jokowi*. Mediaindonesia.com. 02 Juli 2022. Diakses 30 Mei 2023 <https://mediaindonesia.com/opini/503668/misi-damai-jokowi>
- Aryo Putranto Saptohutomo. (2022). *Diplomasi Jokowi untuk Damaikan Rusia-Ukraina Dinilai Butuh Kesabaran*. Kompas.com. 08 Juli 2022. Diakses 18 Mei 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/08/05310001/diplomasi-jokowi-untuk-damaikan-rusia-ukraina-dinilai-butuh-kesabaran>
- Chandra Gian Asmara. (2022). *Simak! Ini Dia Hasil Lengkap Pertemuan Jokowi-Zelensky*. Cnbcindonesia.com. 30 Juni 2022. Diakses 20 Maret 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220630091735-4-351669/simak-ini-dia-hasil-lengkap-pertemuan-jokowi-zelensky>
- Chandra Gian Asmara. (2022). *Ukraina-Rusia Masih Memanas, Misi Damai Jokowi Gagal?*. Cnbcindonesia.com. 04 Juli 2022. Diakses 04 September 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220704151332-4-352801/ukraina->

- [rusia-masih-memanas-misi-damai-jokowi-gagal](#)  
Humas Kemensetneg. (2022). *Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara*. Presidenri.go.id. 29 April 2022. Diakses 20 Maret 2023 <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bahas-solusi-damai-perang-rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/>
- Joko Widodo. (2022). *Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia*. Twitter.com. 24 Februari 2022. Diakses 16 November 2022 <https://twitter.com/jokowi/status/1496805962274930688>.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina*. Kemlu.go.id. 30 Juni 2022. Diakses 15 Mei 2023 <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/president-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>
- Katriana. (2022). *Indonesian peace mission on Russia-Ukraine conflict*. Bloomberg.com. 03 Juli 2022. Diakses 20 Maret 2023 <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-03/indonesian-peace-mission-on-russia-ukraine-conflict>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *President Jokowi: The Visit to Ukraine Shows Indonesia's Concern for Ukraine*. Kemlu.go.id. 30 Juni 2022. Diakses 20 Maret 2023 <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3752/berita/president-jokowi-the-visit-to-ukraine-shows-indonesias-concern-for-ukraine>
- Lb.ua. (2022). *Індонезія: недооцінений партнер*. Lb.ua. 30 Juni 2022. Diakses 14 Mei 2023 [https://lb.ua/world/2022/06/30/521684\\_i\\_ndoneziya\\_nedootsineniy\\_partner.html](https://lb.ua/world/2022/06/30/521684_i_ndoneziya_nedootsineniy_partner.html)
- Prabowo, Gama. (2020). *Sejarah Runtuhnya Uni Soviet (1991)*. Kompas Media Nusantara. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/30/162011769/sejarah-runtuhnya-unisoviet-1991>
- Qothrunnada, Kholida. (2022). *Wajib Baca! Daftar Lengkap Negara yang Beri Sanksi ke Rusia*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5960937/wajib-baca-daftar-lengkap-negara-yang-beri-sanksi-ke-rusia>.
- Ravi Buddhavarapu. (2022). *Jokowi says rising food prices are dangerous and put developing nations like Indonesia at risk*. Cnbcindonesia.com. 19 Juni 2022. Diakses 01 April 2023 <https://www.cnn.com/2022/06/20/jokowi-food-inflation-is-dangerous-for-developing-nations-like-indonesia.html>
- Rasdiyanah. (2022). *Jokowi Umumkan Putin Sepakat Buka Jalur Ekspor Gandum Ukraina*. Portalmedia.id. 01 Juli 2022. Diakses 02 Juli 2023. <https://portalmedia.id/read/39/jokowi-umumkan-putin-sepakat-buka-jalur-ekspor-gandum-ukraina>
- Sebastian Strangio. (2022). *Indonesia's President Jokowi to Visit Russia, Ukraine: Report*. Thediplomat.com. 21 Juni 2022. Diakses 01 April 2023 <https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-president-jokowi-to-visit-russia-ukraine-report/>
- Tim CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Akui Sulit Damaikan Putin-Zelensky: Saya Belokkan ke Pangan*. Cnnindonesia.com. 23 Agustus 2022. Diakses 25 Mei 2023 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220823113653-106-837951/jokowi-akui-sulit-damaikan-putin-zelensky-saya-belokkan-ke-pangan>
- Vedomosti.ru. (2022). *Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского*. Vedomosti.ru. 30 Juni 2022. Diakses 15 Mei 2023 <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/06/30/929350-prezident-indonezii-zelenskogo>